



Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia

Aslan, Hifza

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

aslanmarani88@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>

Received: July 20, 2019

Revised: October 04, 2019

Approved: October 14, 2019

Abstrak

Sejak era penjajahan Belanda dan Jepang, perkembangan lembaga pendidikan Islam mengalami pergeseran. Pada masa Belanda terjadi diskriminasi pendidikan, sementara pada masa Jepang diskriminasi dihapuskan. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengeksplorasi sistem kebijakan Jepang terhadap Indonesia dan (2) mendeskripsikan sistem kebijakan Jepang terhadap masyarakat Sambas, Kalimantan Barat. Didesain dengan studi literatur, studi ini menjawab fokus penelitian dengan menganalisis literatur baik buku, jurnal nasional maupun internasional, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Hasil kajian mengungkapkan bahwa pertama, sistem kebijakan Jepang di Indonesia membawa visi Nipponisasi yang diajarkan di segala bidang, termasuk dalam hal pendidikan. Tujuan Jepang adalah sebagai pemimpin Asia Raya dengan memengaruhi masyarakat Indonesia dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang. Kedua, terkait dengan sistem kebijakan di Sambas, Jepang lebih terbuka terhadap masyarakat Sambas karena kunci kelemahan Sambas adalah agama. Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka organisasi-organisasi keislaman agar mendapat dukungan sebagai pemimpin Asia Raya. Agar misi Jepang ini berhasil, lembaga pendidikan menghapus diskriminasi dengan tidak lagi memandang perbedaan, sebagai tujuan untuk menanamkan isi Nipponisasi.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Masa Penjajahan Jepang, Pendidikan di Sambas

Abstract

Since the Dutch and Japanese colonial era, the development of Islamic educational institutions has shifted in various paradigms. During the Dutch period, educational discrimination occurred, while the discrimination was abolished in Japan. In response to this reality, the study aims to explore the Japanese policy system toward Islamic education in Indonesia and to describe their policy systems for the people of Sambas, West Kalimantan. Grounded in a literature study, this articles provides a thorough analysis of book references, nationally and internationally reputed journals, and other

resources relating to Islamic education during the Japanese colonization in Indonesia. Findings of the study expose that firstly, the Japanese policy system in Indonesia demonstrated the vision of Nipponization embedded in a wide array of sectors, including education. The Japan's goal was to be the leader of the Greater Asia by influencing Indonesian society with an education system designed by Japan. Secondly, concerning the policy system in Sambas, Japan was more open to the Sambas community for the key weakness of Sambas was religious issues. This openness intended to promote Islamic organizations to gain support as leaders of the Greater Asia. To succeed this mission, educational institutions eroded any discrimination by no longer looking at diversity, as a goal to incorporate the Nipponization-based contents.

Keywords: *Islamic Education Curriculum, Japanese Colonization, Sambas' Education*

PENDAHULUAN

Sebelum Islam berkembang di Indonesia, negara Indonesia mempunyai corak agama Hindu dan Budha. Agama tersebut memengaruhi sistem kerajaan, pemerintahan, dan corak kehidupan masyarakat. Kerajaan yang paling berpengaruh di Indonesia pada waktu itu berada di Selat Malaka, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Utara. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 M, maka agama Hindu dan Budha secara berangsur mengalami pergeseran menjadi agama Islam, walaupun tidak secara keseluruhan (Sabarudin, 2015; Lapidus, 1991). Agama Islam masuk ke Indonesia tidak terlepas dari peran pedagang yang berasal dari Timur Tengah dan negara-negara lainnya. Penyebaran agama Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari lembaga pendidikan agama Islam yang didirikan di Indonesia pada waktu itu.

Perkembangan lembaga pendidikan Islam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari rumah tok guru, surau, musala, masjid, sampai pondok pesantren. Nilai-nilai Islam menyinari akhlak-akhlak dari para santrinya. Ajaran Islam yang dibawa pun tidak terlepas dari tokoh-tokoh ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah, seperti Mekah, Madinah, dan Mesir sehingga ketika pulang mengajarkan ilmunya kepada para santri di Indonesia. Kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren pun berasal dari Timur Tengah dengan tulisan arab gundul. Di masa-masa kejayaan Islam, perkembangan lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan yang luar biasa, tetapi mengalami tantangan ketika Belanda datang ke Indonesia.

Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta (Sabarudin, 2015). Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang, seperti halnya dengan negara-negara Timur lainnya, tetapi

karena Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tujuan Belanda berubah dan mulai menginginkan Indonesia. Keinginan Belanda semakin kuat terhadap Indonesia dengan menerapkan semboyan 3G, *Glory* (kemenangan dan kekuasaan), *Gold* (emas atau kekayaan) dan *Gospel* (upaya pengkristenan masyarakat Indonesia) (Hasnida, 2017). Hampir secara keseluruhan ketiga misi keinginan Belanda terhadap Indonesia dikatakan cukup berhasil baik kekuasaan, kekayaan, dan pengkristenan.

Penerapan keinginan kebijakan Belanda dengan misi 3G, dikenal sebagai politik etis selama berkuasa di Indonesia 350 tahun lamanya dan mengalami perubahan ketika Jepang datang ke Indonesia. Misi Belanda dan Jepang pada hakikatnya adalah sama, tetapi cara pendekatan untuk menguasai Indonesia antara Belanda dan Jepang sangat bertolak belakang. Jepang mengambil simpati masyarakat Indonesia dengan mengaku sebagai saudara umat muslim dan membantu umat muslim atas penjajahan Belanda.

Misi Belanda dikenal dengan dengan misi westernisasi, kristenisasi, (Yunani, 2016), dan politik etis bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia yang dianggap tertinggal dengan negara Eropa (Susilo, 2018; Mujiburrahman, 2006; Aisyah, 2018; Aslan, 2018; Burhanuddin, 2008). Untuk mengenalkan agama kristen, Belanda mendirikan gereja yang nantinya akan digunakan sebagai tempat melaksanakan pendidikan. Belanda memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan Belanda karena masyarakat pribumi hanya digaji dengan gaji ala kadarnya dibandingkan mendatangkan orang-orang Belanda di Indonesia dengan upah yang tinggi (Khoiriyah, 2017). Sementara Jepang menjajah Indonesia membawa misi politik Nippon, dengan simbol tiga A, “Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Cahaya Asia”. Tujuan Jepang adalah menguasai Asia Raya dengan bantuan masyarakat Indonesia (Rohman, 2018). Asia Raya yang dimaksud oleh Jepang terdiri atas delapan wilayah, diantaranya “Manchuria, daratan Cina, Kepulauan Muangthai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Rusia” (Sabarudin, 2015). Perbedaan dari misi kedua penjajah yang datang ke Indonesia tersebut, memberikan gambaran yang berbeda bagi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Indonesia.

Perbedaan misi dan strategi antara Belanda dan Jepang untuk mencari simpati masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang paling berperan adalah adanya keinginan Jepang untuk menguasai Asia Raya sekaligus menjadi pemimpinya. Jepang mengaku

saudara bagi umat Islam dan ingin membantu masyarakat Indonesia atas penindasan Belanda. Rayuan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Indonesia, terlebih lagi tokoh ulama yang sangat berpengaruh di masyarakat, menjadi incaran Jepang untuk memengaruhinya. Ketika sudah masuk perangkap dan masyarakat Indonesia membantu Jepang untuk mengalahkan Belanda, maka Jepang baru melaksanakan tugasnya untuk menyerang Belanda dan armada-armada Perang Belanda.

Sebelum datang ke Indonesia, Jepang terlebih dahulu memberitahu kedatangannya melalui siaran radio Tokyo dan melakukan penyebaran pamflet-pamflet dengan pesawat tempur yang disebar dari atas pesawat di berbagai wilayah Indonesia (St. Hadidjah, 2007). Armada-armada Jepang yang meluluhlantakkan armada perang para sekutu, yakni Amerika yang bekerja sama menjajah Indonesia, terlebih dahulu dihancurkan oleh Jepang. Ketika armada perang para sekutu hancur, maka secara otomatis kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang.

Jepang datang ke Indonesia dan melakukan penyerangan terhadap Belanda pada tanggal 10 Januari 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan dalam waktu yang singkat, Jepang telah menguasai Indonesia secara keseluruhan (Jones, 2015; Daulay, 2018; Rofi, 2018). Jepang dengan mudahnya mendarat ke Indonesia, tidak terlepas dari bantuan masyarakat Indonesia, terlebih lagi Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dari penjajahan Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia, dengan misi Nippon Asia, sebagai pemimpin Asia Raya nantinya, maka segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Belanda, dihapus oleh Jepang dengan menggunakan sistem kebijakan yang baru, termasuk dalam hal kurikulum pendidikan. Organisasi-organisasi keislaman juga dibentuk oleh Jepang, tetapi lama kelamaan organisasi tersebut dilarang oleh Jepang, karena berbau politik yang ingin menghancurkan singgasana Jepang di Indonesia. Kejadian ini pula hampir seluruhnya terjadi di kepulauan Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas.

Sambas termasuk daerah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar atau kategori perbatasan antara Malaysia dan Indonesia (LPDP, 2015). Luas wilayah Sambas sejumlah 639.570 ha dengan panjang pantai kurang lebih 128,5 km dan panjang perbatasan kurang lebih 97 km. Sambas terletak dibagian barat paling utara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penduduknya heterogen. (Arkanudin, t.t.; Aslan dkk., 2019). Dalam sejarahnya, Sambas yang merupakan wilayah bagian Indonesia ikut juga dijajah oleh Belanda dan

Jepang. Pada saat Belanda berkuasa di Sambas, sistem kebijakannya mengikuti sistem Belanda, sementara pada masa Jepang, sistem kebijakan pendidikan mengikuti era Jepang.

Perbedaan kedua misi antara Belanda dan Jepang memberikan gambaran yang berbeda bagi kebijakan pendidikan yang ada di Sambas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia secara umum pada masa Jepang, yang berimbas pada daerah perbatasan Sambas di masa kesultanan Sambas. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari sebuah kurikulum karena setiap perubahan kurikulum tidak terlepas dari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik.

Kurikulum banyak dikaji oleh pakar-pakar kurikulum yang tidak terlepas dari sistem dan proses dalam pembelajaran, (Aslan, 2015; Aslan, 2016); Aslan, 2019), tetapi pembahasan dalam ruang lingkup yang dikaji adalah tentang kebijakan pendidikan di Sambas ketika Jepang datang ke Sambas. Penelitian ini juga memberikan sedikit gambaran pendidikan di masa Belanda, tetapi tidak secara keseluruhan, karena kajian tentang Belanda telah terlebih dahulu peneliti bahas, baik yang sudah terbit, (Aslan, 2018) maupun yang telah dibahas oleh dosen ahli sejarah yang ada di Insititut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (Risa, 2014; Risa, 2015; Sunandar, dkk., 2019). Selanjutnya, penulis juga membahas tentang kurikulum sejarah pendidikan Islam di masa kesultanan Sambas yang masih dalam proses *review*. Kajian ini menggunakan literatur atau kajian pustaka. Kajian ini merujuk pada sejumlah buku, majalah, jurnal nasional, dan internasional yang terkait dengan penelitian (Aslan, 2017; Sulistya, 2019). Keterkaitan sejumlah buku dan artikel diambil sesuai dengan tujuan yang akan diteliti dari pembahasan ini.

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA

Indonesia yang kaya dengan alamnya membuat bangsa Eropa menginginkan Indonesia dengan berbagai macam strategi yang dilakukannya seperti Negara Belanda. Belanda yang pada awalnya hanya bertujuan untuk berdagang di Indonesia, tertarik akan jumlah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang tidak ternilai harganya, membuat Belanda ingin menguasai Indonesia. Hampir 350 tahun lamanya Belanda telah menguasai

Indonesia. Kebijakan politik etis yang dilakukan oleh Belanda hampir dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kekuasaan Belanda di Indonesia mengalami kehancuran ketika Jepang juga menginginkan Indonesia. Strategi yang digunakan Jepang untuk menguasai Indonesia adalah melakukan penyerangan kepada pihak sekutu Belanda, yakni Amerika. Keberhasilan Jepang dalam menghancurkan armada angkatan Laut Pasifik di Pearl Harbour yang dimiliki oleh Amerika pada tanggal 7 Desember 1941, membuat kekuatan Jepang semakin kuat untuk menguasai Asia Timur Raya, salah satunya Indonesia (Koen, 1957). Masyarakat Indonesia juga mengeluh-keluhkan kedatangan Jepang yang berjanji akan membebaskan Indonesia dari Belanda (Rohman, 2018). Sorak gemuruh masyarakat Indonesia atas janji Jepang memberikan kemerdekaan, mendapat perlawanan dari Belanda. Akan tetapi, Belanda juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat Indonesia.

Wilayah pertama di Indonesia yang ditaklukkan Jepang pada tanggal 10 Januari 1942 adalah daerah Tarakan, Kalimantan, dan wilayah-wilayah nusantara lainnya. Kemudian, diikuti daerah Jawa tanggal 8 Maret 1942. Jenderal Belanda, Teer Porten mengakui kealahannya serta atas nama Belanda di seluruh Indonesia, sehingga secara otomatis Jepang menguasai Indonesia (Khoiriyah, 2017; Tendi, 2018). Kekuasaan Belanda beralih kepada tangan Jepang sehingga segala kebijakan sesuai dengan keinginan Jepang. Agar Jepang semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia, maka Jepang semakin terbuka dan lunak terhadap Indonesia.

Masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk bersama-sama membangun Indonesia tercinta sehingga Jepang mengizinkan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh Indonesia, diantaranya; mengizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih disamping bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia tetapi melarang menggunakan bahasa para sekutu, seperti bahasa Belanda, Inggris, dan Amerika, menyanyikan lagu Indonesia raya, membuka organisasi-organisasi Islam di Indonesia, dan mendirikan perguruan tinggi di Jakarta (Tendi, 2018). Organisasi Islam di zaman Belanda sudah ada, tetapi diurus oleh Belanda kemudian Jepang memberikan hak penuh kepada umat Islam untuk mengurus organisasi Islam tersebut, yang secara langsung diserahkan kepada K. H. Hasyim Asy'ari (Assegaf, 2007; Hasnida, 2017; Zamroni, 2019; Nugraha, 2019). Sistem pemerintahan pun banyak mempekerjakan masyarakat pribumi, bahkan jabatan tertinggi seperti wakil gubernur diisi oleh pribumi (Toer, 2002; Tendi,

2018). Hampir semua organisasi Islam mendapat persetujuan dari Jepang, termasuk lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren. Namun, semuanya di bawah pengawasan Jepang.

Hampir setiap minggu Jepang melakukan kunjungan ke pondok pesantren dan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam tersebut. Hubungan dengan para pemimpin pondok semakin dipererat agar Jepang kedudukannya semakin kuat dari pengaruh kiai tersebut (Maksum, 1999; Sabarudin, 2015). Dalam hal pendidikan yang didirikan oleh Belanda semuanya dihapus oleh Jepang sehingga sistem kebijakan Jepang tidak mengenal diskriminasi.

Jenjang sekolah di masa Belanda diubah oleh Jepang menjadi Sekolah Rakyat, walaupun perlakuan Sekolah Rakyat ini mengalami perbedaan dari sistem yang ada di Indonesia seperti di Jawa. Sekolah Dasar di Jawa terdiri atas tiga jenjang; sekolah rakyat pertama (*shoto kokumin-gakko*) dari kelas 1-3, sekolah rakyat umum (*futsu kokumin-gakko*), dari kelas 4-6. Secara umum, sekolah yang dikenal masa Jepang adalah Sekolah Rakyat (*kokumin-gakko*) yang dilaksanakan selama 6 tahun, dari kelas 1-6. Setelah Sekolah Rakyat, Jepang menyiapkan Sekolah Menengah Pertama dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas dengan jenjang masing-masing 3 tahun (Kawamura, 2004). Tingkat sekolah menengah, Jepang juga mendirikan sekolah kejuruan, seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian (Khoiriyah, 2017; Hasnida, 2017).

Mata pelajaran yang diajarkan di Indonesia, sama halnya yang diajarkan di Jepang dengan menganut paham kekaisaran tentang kepatuhan dan kesetiaan (Makmur, 2013). Untuk melaksanakan tugas mengajar di sekolah, maka Jepang mengambil tenaga pendidik dari Indonesia yang diseleksi di tiap kabupaten. Setelah selesai penyeleksian, maka diadakan pelatihan di Jakarta. Setelah selesai maka kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi guru di sekolah yang terdapat di daerah tersebut (Khoiriyah, 2017). Guru yang mendapatkan pelatihan di Jakarta dengan waktu beberapa bulan, mendapatkan materi sesuai dengan kebijakan Jepang, yang nantinya akan diajarkan kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Kurikulum masa Belanda dihapus oleh Jepang, tetapi kurikulum dari segi mata pelajaran digunakan oleh Jepang dengan beberapa perubahan. Jepang membuat buku mata pelajaran terbaru yang terdiri atas latihan rohani (*shushin*) dengan judul “*Yoi*

Kodomo Maki-Ichi”, sejarah Jepang dan ilmu bumi “Asia Raya”, bahasa Jepang, nyanyian, bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu bercocok tanaman, ilmu kesehatan, kerajinan, latihan jasmani, menggambar sejarah, pengetahuan alam (Kawamura, 2004). Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar yang bertujuan untuk mengajarkan budaya-budaya Jepang (Ramayulis, 2011: 340). Beberapa tahun lamanya, masyarakat Indonesia belajar tentang mata pelajaran yang diajarkan oleh Jepang sehingga keinginan Jepang semakin kuat untuk menguasai Indonesia. Jepang sadar bahwa negaranya suatu saat tidak akan mampu melawan para sekutu jika tidak mendapatkan bantuan dari Asia Raya, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, sistem pendidikan di Jepang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia hanya berjalan selama satu tahun setengah dan pada bulan September 1943, Jepang membuat kebijakan baru dengan misi Nipponisasinya sehingga Jepang mengajarkan kepada rakyat Indonesia tentang latihan militer (Kawamura, 2004). Latihan-latihan militer yang diajarkan Jepang untuk masyarakat Indonesia, diadakan di Jakarta selama 3 bulan, diantaranya; *Pertama*, mengumpulkan batu dan pasir. *Kedua*, membersihkan bengkel dan asrama Jepang. *Ketiga*, menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan Jepang. *Keempat*, pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang dan setiap pagi mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang. Ucapan tersebut menggunakan bahasa Jepang (Ramayulis, 2011: 340). Bagi para pemimpin pondok dan masyarakat yang berpengaruh diberikan pelatihan agar sejalan dengan ideologi Jepang selama sebulan di Jakarta (Rohman, 2018).

Selain itu Jepang menerapkan propaganda perbedaan Nipponisasi antara masyarakat yang tinggal di kota dan desa. Propaganda tersebut adalah serangkaian pesan untuk memengaruhi kelakuan masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas buta huruf dan kurang terdidik, propaganda Jepang dilakukan melalui hiburan, seperti film layar lebar, drama, wayang kulit, tari, nyanyian, dan radio. Sementara bagi masyarakat perkotaan yang mayoritas pendidik, propaganda Jepang adalah menerapkan media cetak, surat kabar, dan sejenisnya. Radio digunakan untuk mendengar siaran-siaran tentang kebijakan Jepang, termasuk dalam hal pendidikan dan berita-berita yang disiarkan oleh Ir. Soekarno (Rohman, 2018). Siaran radio ini juga pada awalnya digunakan oleh Belanda (Syam, 2015). Kebijakan-kebijakan yang baru diterapkan oleh

Jepang bagi masyarakat Indonesia, mengalami penurunan dari setiap segi, termasuk dalam bidang pendidikan.

Jumlah sekolah di masa Belanda berjumlah 21.500, di masa Jepang menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850, menjadi 20. Hampir setiap murid yang sekolah pada tingkat dasar, mengalami kemerosotan sejumlah 30% (Rofi, 2018). Di sekolah agama, Jepang melarang untuk mengajarkan agama (Daulay, 2018).

Misi-misi politik Nipponisasi Jepang semakin tampak pada perlakuan Jepang terhadap masyarakat Indonesia yang terlihat dengan jelas, diantaranya; *Pertama*, Jepang menyuruh umat muslim apabila shalat menghadap matahari. *Kedua*, Jepang mandi tanpa menggunakan penutup aurat di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan tempat umum lainnya. *Ketiga*, Jepang menjadikan wanita-wanita Indonesia sebagai pelampiasan nafsunya sehingga banyak anak yang lahir tanpa ayah. *Keempat*, Belanda memerintahkan kerja rodi bagi masyarakat Indonesia, sementara Jepang kerja *Romusha* yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. *Kelima*, polisi rahasia Jepang yang disebut dengan Kempeitei, terkenal dengan ganasnya. Masyarakat yang mencurigakan langsung ditangkap dan dibunuh sehingga membuat ketakutan bagi masyarakat Indonesia (St. Hadidjah, 2007; Nata, 2014). Atas beberapa kejadian yang tidak sepehaman dengan keinginan masyarakat pribumi, setiap harinya Jepang semakin memperlakukan masyarakat pribumi tidak ubahnya seperti binatang. Masyarakat pribumi sudah menyadari misi Jepang datang ke Indonesia hanyalah memperlalat untuk menguasai Asia Raya dengan bantuan masyarakat Indonesia. Kemudian, masyarakat Indonesia sudah melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan bekerja sama dengan etnis-etnis lainnya yang tinggal di Indonesia.

Pemberontakan yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk melawan Jepang seperti pemberontakan di Aceh, Banjarmasin, Tasik Malaya di Jawa Barat, dan pemberontakan lainnya, tetapi hasil perlawanan tersebut tidak juga membuahkan hasil. Ketidakberhasilan tersebut membuat masyarakat Indonesia bersatu dan organisasi-organisasi Islam yang dibentuk oleh Jepang pada awalnya juga ikut melakukan perlawanan seperti Majelis Syurah Muslim Indonesia, Hizbullah, dan organisasi lainnya dengan mengeluarkan pernyataan “Kami bangsa Indonesia sesungguhnya didirikan atas ridha Allah. Kami kaum Muslimin Indonesia dan beribu-ribu kekuatan bersenjata Muslim, siap mempertahankan kehormatan agama dan negeri kami” (St. Hadidjah, 2007). Atas pernyataan ini, mengakibatkan semangat Jepang untuk menguasai seluruh Indonesia

dan sebagai pemimpin Nippon Asia dibawah bantuan umat muslim di Indonesia tidak berhasil, terlebih setelah tragedi pengeboman kota Jepang.

Kota Nagasaki dan Hirosima di bom oleh pihak sekutu Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menyebabkan pihak Jepang menyerah kepada sekutu (Razali, 2013). Jepang kembali ke negaranya untuk menyelamatkan negaranya dari Amerika (Nata, 2014), sehingga Indonesia merdeka dari jajahan Jepang. Walaupun pihak sekutu Belanda ingin mengambil alih kembali Indonesia, namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat Indonesia (Ideham dkk., 2015; Noor, 2015). Akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai simbol pihak Indonesia mendapatkan hak kemerdekaan yang penuh.

KURIKULUM PENDIDIKAN JEPANG DI SAMBAS

Kebijakan Politik Jepang dengan misi Nippon agar Jepang berkuasa atas kepemimpinannya di Asia Raya, maka Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk mencapai tujuannya tersebut. Kebijakan Jepang hampir dirasakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di daerah perbatasan yaitu Sambas.

Sebelum Jepang menguasai Sambas, masyarakat Sambas berada di bawah kendali sistem kebijakan Belanda. Belanda melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Sambas tetapi Jepang justru menghapuskan diskriminasi tersebut sehingga bantuan Jepang sangat dielu-elukan oleh masyarakat Sambas secara keseluruhan. Apalagi janji manis Jepang untuk memberi kemerdekaan penuh kepada Indonesia. Jepang yang telah menguasai Indonesia dan Jenderal Belanda yang mengakui kekalahannya terhadap Jepang, maka dalam waktu yang singkat Jepang menguasai Indonesia termasuk di daerah Kalimantan Barat.

Jepang datang ke Kalimantan Barat untuk mengusir Belanda dimulai pada bulan Desember tahun 1941. Untuk menguasai Pontianak, Jepang melakukan pengeboman di Pontianak pada tanggal 19 Desember 1941. Sejumlah 9 buah pesawat tempur diturunkan untuk menghancurkan rumah-rumah masyarakat di Pontianak dan Singkawang. Beberapa hari kemudian, Jepang mengirim 3000 pasukan tentara dengan armada perang 12 buah kapal laut, 5 *landing Ship*, sejumlah tentara berjalan kaki dari Serawak untuk memasuki daerah Kalbar di pedalaman seperti Ngabang, Sanggau, Sintang, Nangah Pinoh, Kotabaru, Nanga Sukan, dan Nanga Tayap (Pitria, 2017; Usman MHD, 2010). Strategi

Jepang untuk menghancurkan kekuatan Belanda di Kalbar, telah diantisipasi oleh Belanda untuk melakukan perlawanan dengan melakukan pengintaian pergerakan Jepang.

Pengintaian terhadap Jepang yang dilakukan oleh Belanda di Bengkayang dengan nama “Pos Intai Bukit Vandreng” yang didirikan oleh masyarakat atas perintah Belanda, tidak juga membuahkan hasil (Sirojuddin, t.t.). Lambat laun operasi Jepang berhasil untuk menduduki Kalbar, Pemangkat dan Sambas berhasil ditempati Jepang pada tanggal 29 Januari 1942 (Usman MHD, 2010; Suhendra dkk., 2019). Ketika Jepang menguasai Sambas, maka seluruh bangunan Belanda dihancurkan oleh Jepang, kecuali jembatan sebagai sarana penyebrangan masyarakat (Tribun Pontianak, 2019). Sementara, lembaga pendidikan yang dibangun Belanda ditutup selama beberapa minggu kemudian dibuka kembali (Amrullah & Wulandari, 2015). Diskriminasi pendidikan di zaman Belanda juga dihapuskan oleh Jepang (Pitria, 2017). Pendidikan masa Belanda yang membedakan antara pendidikan kalangan kerajaan, pejabat kerajaan, dan masyarakat biasa dengan perbedaan sekolah, mata pelajaran, sarana, dan prasarana pendidikan, maka ketika diambil oleh Jepang, semua masyarakat diberlakukan sama tanpa ada pengecualian dengan mengikuti kebijakan Jepang.

Jepang memberlakukan bahasa Jepang untuk digunakan di sekolah Sambas yang dibarengi dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tujuan Jepang dengan menyelipkan bahasa Jepang adalah untuk memperkenalkan budaya Jepang ke anak-anak didik Sambas (Riduan, 2018). Sifat yang lebih terbuka dibandingkan Belanda dan janji-janji manis Jepang, membuat masyarakat Sambas lebih percaya terhadap Jepang, sehingga Jepang memanfaatkan kesempatan ini dengan mendirikan berbagai organisasi Islam untuk menguatkan kedudukan Jepang di Sambas. Akan tetapi, niat Jepang untuk mempertahankan kedudukannya dengan mengambinghitamkan masyarakat Sambas membuat politik yang didirikan oleh Jepang di Kalbar, termasuk Sambas sehingga organisasi tersebut melakukan misi perlawanan kepada Jepang. Sebelum perlawanan dilakukan, ternyata Jepang terlebih dahulu mengetahui niat masyarakat Sambas melalui intel-intel polisi Jepang. Sejak saat itu, Jepang yang menerapkan kebijakan politik dari penjajahan simpati beralih ke penjajahan kekerasan dan penyiksaan.

Jepang melakukan penyitaan berbagai macam obat-obatan, pakaian, makanan, sehingga masyarakat Sambas banyak mengalami busung lapar (Pitria, 2017: 314–315).

Segala sistem pemerintahan dipindahkan ke Singkawang (Belo, 2016; Mardiyati, 2011). Jepang menangkap semua yang terlibat dalam organisasi yang disetujui oleh Jepang, seperti organisasi Nissinkai (Vitae, 2011). Sultan-sultan Kalbar yang terlibat sebagai otak untuk penyerangan Jepang dari bawah tanah ditangkap, termasuk Sultan ke 15 Sambas, yakni Sultan Mulya Ibrahim. Kemudian, Jepang membunuh para ulama, cendekiawan, dokter, guru, pengusaha sukses, tokoh politik, tokoh masyarakat, dan orang berpengaruh lainnya yang tidak lagi memandang agama maupun etnis (Said & Wulandari, 1995; Sudarmanto, 2007; Tim Media Pusindo, 2008; Mirnawati, 2012; Junaedi, 2014; Mustansyir, 2016; Pitria, 2017; Posha, dkk., 2018). Tragedi pembunuhan berdarah yang dilakukan oleh Jepang yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 1944, dikenal sebagai “Peristiwa Mandor Berdarah” (Vitae, 2011; Pahlevi, 2012). Jepang menyebut peristiwa ini sebagai genosida. Masyarakat-masyarakat yang dijemput oleh Jepang dimasukkan dalam “Oto Sungkup” sehingga tragedi ini dikenal juga sebagai “*Kereta Neraka*”. Hampir 20.000 jiwa Jepang membunuh masyarakat Kalbar dengan pedang Samurai dan dengan senjata api secara beruntun di kereta tersebut (Prabowo, 2018; St. Hadidjah, 2007). Jumlah yang telah mencapai ribuan jiwa masyarakat Kalbar merupakan simbol dari Jepang, satu yang bersalah maka semuanya menanggung akibatnya (Rizal, 2016). Beberapa ulama yang telah meninggal dunia dibunuh oleh Jepang, membuat masyarakat Kalbar banyak kehilangan orang-orang yang terdidik, ulama, dokter, guru dan lainnya. Kalbar mengalami krisis para ulama dan orang-orang terdidik.

Gelar ulama di Sambas dengan sebutan Maharaja Imam meredup di masa Jepang berkuasa (Sunandar dkk., 2019). Namun, ulama hanya menyisakan kenangan yang ditulis dengan sebutan kitab seperti yang dilakukan oleh Muhammad Basiuni Imran (Parwanto, 2019). Basiuni Imran merupakan salah satu tokoh penggerak bagi masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tokoh pejuang pembela kemerdekaan untuk mengusir Jepang dari tanah Melayu, (Oktorino, 2013) dengan semangat kebangsaan dan tanpa menyerah akhirnya Jepang menanamkan misi Nipponisasi dengan cara mengambinghitamkan masyarakat Sambas. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil dan Jepang akhirnya kembali ke daerah asalnya untuk meninggalkan Sambas terlebih lagi Jepang mengalami kekalahan dari sekutu.

Hancurnya kota Nagasaki dan Hiroshima oleh para sekutu Amerika membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 (Razali, 2013).

Pascakekalahannya Jepang, membuat Belanda menginginkan kembali Sambas (Nagazumi, t.t.). Letnan Belanda, Gubernur Jenderal Van Mook, kembali mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia, termasuk Sambas pada tahun 1945-1950, tetapi mengalami perlawanan dari masyarakat Sambas. Masyarakat Sambas beserta organisasi Sambas, seperti Persatuan Bangsa Indonesia Sambas (PERBIS), Persatuan Muslim Indonesia (PERMI), dan organisasi lainnya melakukan penyerangan kepada Belanda, walaupun perlawanan tersebut menumpahkan para pejuang-pejuang Sambas (Pitria, 2017: 315; Sunandar dkk., 2019). Bentuk perlawanan pejuang Sambas untuk mendapatkan kemerdekaan yang sampai saat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan termasuk Kalbar dan wilayah-wilayah Kalbar lainnya sehingga pemerintah daerah menempatkan para pejuang Sambas sebagai tokoh pahlawan Sambas.

Dengan demikian, dari beberapa sejarah datangnya Jepang ke Sambas untuk membantu masyarakat Sambas dari penjajahan Belanda, tetapi bantuan tersebut hanyalah sebagai bantuan yang menginginkan masyarakat Sambas untuk mengusir Jepang dan menggantikan kekuasaan Belanda oleh Jepang. Visi dan misi untuk membangun Sambas, hanyalah untuk menjadikan masyarakat Sambas sebagai budak yang melayani Jepang, termasuk dari segi pendidikan. Pendidikan hanyalah untuk mengenalkan tentang budaya Jepang yang patuh terhadap kaisar yang ingin diterapkan kepada masyarakat Sambas.

SIMPULAN

Dualisme perbedaan visi dan misi penjajah yang datang ke Indonesia baik Belanda dan Jepang memiliki perbedaan dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi masyarakat Indonesia. Ketika Belanda datang ke Indonesia dengan menerapkan politik etis dan misi kristenisasi dan westernisasi, mendapatkan perlawanan bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi pemimpin pondok pesantren yang secara keras dan lantang menentang kebijakan Belanda. Ketidaksetujuan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan kebijakan Belanda, membuat Jepang menerapkan visi dan misi yang berbeda dengan Belanda. Jepang hanya menerapkan misi Nipponisasi sebagai pemimpin Asia Raya, tanpa melakukan perlawanan terhadap Islam. Bahkan, umat Islam didekati dengan sebaik mungkin untuk mencari simpati agar kekuasaannya semakin lama di Indonesia. Keterbukaan Jepang terhadap Indonesia membuat masyarakat

Indonesia melakukan perlawanan kepada Jepang dan lambat laun Jepang mengakui kekalahannya apalagi setelah kotanya dihancurkan oleh para sekutu Amerika.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2018). *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kiprah Sosial dan Kiprah Akademik Alumni IAIN Antasari Banjarmasin* [Disertasi Tidak Diterbitkan]. UIN Antasari Banjarmasin.
- Amrullah, A., & Wulandari, I. (2015, Juni 29). *HM Basioeni Imran, Maharaja Imam Pembaharu Pendidikan Sambas (2-habis)*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/06/29/nqovfd-hm-basioeni-imran-maharaja-imam-pembaharu-pendidikan-sambas-2habis>
- Arkanudin. (t.t.). *Pluralisme Suku dan Agama Di KALBAR* [(Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial, Untan Pontianak)].
- Aslan. (2015). *Pengembangan Kurikulum Ke Arah Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam bunga rampai Proceeding: Peluang dan Tantangan Negara-Negara di Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*. Intelegensia Media.
- (2016). Kurikulum Pendidikan vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Studi Islam dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- (2017). *Pumping Teacher dalam Tantangan Pendidikan Abad 21*. 2(2), 89–100.
- (2018). Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda. *Syamil*, 6(1), 39–50.
- Aslan. (2019). *Hidden Curriculum*. Pena Indis.
- Aslan, S. A., & Hifza. (2019). Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 11(1), 11–30. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1403>
- Assegaf, A. (2007). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Suka Press.
- Belo, M. I. O. M. (2016). *Islam di Kesultanan Sambas Kalimantan Barat (1600-1732)* [Skripsi Tidak Diterbitkan]. Sanata Dharma.
- Burhanuddin, Y. M. (2008). *Bali Yang Hilang: Pendetang, Islam, dan Etnisitas di Bali*. Kanisius.
- Daulay, H. P. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.

- Hasnida. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *KORDINAT*, XVI(2), 237–256.
- Ideham, M. S., Djohansjah, J., Kawi, D., Sjarifuddin, Seman, S., Usman, G., Sandeta, B., Syarifuddin R, Arijadi, H. M. A., Mugeni, M., Anis, M. Z. A., Kasnowihardjo, G., Hadijah, S., Triatno, A., & Wajidi. (2015). *Urang Banjar & Kebudayaannya.*, (Ed) M. Suriansyah Ideham, H. Sjarifuddin, M. Zainal Arifin Anis, Wajidi (Cet-2). Ombak.
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Junaedi, D. (2014). *Pahlawan-Pahlawan Indonesia Sepanjang Masa*. Indonesia Tera.
- Kawamura, C. (2004). Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang dari Perspektif Buku Pelajaran. *Lembaran Sejarah*, 7(1), 155–172.
- Khoiriyah, R. (2017). Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Kiai Hasyim Asy'ari. *Jurnal Islam Nusantara*, 01(02), 156–170.
- Koen, A. P. (1957). *Perang Pasifik 1941-1945*. Pintu Besar.
- Lapidus, I. M. (1991). *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LPDP. (2015). *Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (Perbatasan) Tahun 2015* (hlm. 1–6) [Data Daerah Tertinggal]. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Makmur, G. (2013). *Pendidikan Karakter di Jepang dan Mesir* [Makalah S3]. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Maksum. (1999). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Logos.
- Mardiyati, I. (2011). Perkembangan Pendidikan dan Perilaku Keberagaman Pada Masa Kesultanan Sambas. *Walisongo*, 19(2), 335–338.
- Mirnawati. (2012). *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*. Cerdas Interaktif.
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. University Press.
- Mustansyir, R. (2016). *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas Dalam Tinjauan Filosofis: Legenda Rakyat, Filosofi Air dan Tradisi* (ed.) Amin Ma'ruf. Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

- Nagazumi, A. (t.t.). *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nata, A. (2014). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana.
- Noor, Y. (2015). *Islamisasi Banjarmasin*. Ombak.
- Nugraha, M. T. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam: Diandra Kreatif*. Diandra Kreatif.
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah—Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Pahlevi, A. (2012). *Jepang dan Belanda Belum Kembalikan Pusaka Kalbar*. <https://travel.tempo.co/read/401959/jepang-dan-belanda-belum-kembalikan-pusaka-kalbar/full&view=ok>
- Parwanto, W. (2019). Konstruksi Tipologi Pemikiran Muhammad Basiuni Imran (1885-1976 M) Sambas, Kalimantan Barat Dalam Literatur Tafsir. *Substantia*, 21(1), 61–78.
- Pitria. (2017). *Tabrani Ahmad Dan Perjuangannya, dalam “Bunga Rampai” Seni, Budaya & Sejarah Pejuang Sambas*. TOP Indonesia.
- Posha, B. Y., Sewang, A. M., Kara, S. A. H., & Siraj, A. (2018). Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 dalam Bidang Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama. *Jurnal Diskursus Islam*, 06(1), 175–200.
- Prabowo, R. (2018, Juli 8). *Menolak Lupa: Peristiwa Mandor 1944 Pembantaian Terbesar di Indonesia*. [senandika.web.id. http://senandika.web.id/menolak-lupa-peristiwa-mandor-1944-pembantaian-jepang-terbesar-di-indonesia/](http://senandika.web.id/menolak-lupa-peristiwa-mandor-1944-pembantaian-jepang-terbesar-di-indonesia/)
- Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Razali, M. F. (2013). APENDIKS: Transformasi Semangat Kebangkitan Kota Hiroshima dan Kesennuma di Jepang ke Pesantren di Indonesia. *Media Syariah*, XV(2), 271–280.
- Riduan. (2018). *Kepingan Peradaban Islam di Sambas*. <http://kalbar.kemenag.go.id/id/opini/kepingan-peradaban-islam-di-sambas>
- Risa. (2014). Islam di Kerajaan Sambas Antara Abad XVII: Studi Awal Tentang Islamisasi di Sambas. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, 4(2), 105–116.
- Risa. (2015). *Perkembangan Islam di Kesultanan Sambas: Kajian Atas Lembaga Keislaman Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II Tahun 1866-1922*. Ombak.

- Rizal. (2016, September 1). Kengerian Tragedi Mandor yang Pernah Bikin Kalimantan Banjir Darah. *Boombastis.com*. Diperoleh dari <https://www.boombastis.com/kengerian-tragedi-mandor/78504>
- Rofi, S. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Rohman, M. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02(01), 15–33.
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya*, 1(1), 139–174.
- Said, J., & Wulandari, T. (1995). *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sirojuddin, A. (t.t.). *Pos Intai Bukit Vandreng, Saksi Sejarah Kolonial Belanda di Bengkayang: Pariwisata - Situs Budaya Indonesia*. IndonesiaKaya. Diambil 13 Januari 2020, dari <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/pos-intai-bukit-vandreng-saksi-sejarah-kolonial-belanda-di-bengkayang>
- St. Hadidjah. (2007). Kontribusi Pendudukan Jepang Bagi Persatuan Umat Islam di Indonesia. *Jurnal Hunafa*, 4(2), 143–154.
- Sudarmanto, J. B. (2007). *Jejak-jejak pahlawan: Perekat kesatuan bangsa Indonesia*. Grasindo.
- Suhendra, Hidayat, A., Nopriandy, F., & Setiawan, B. (2019). *Pengantar Tenun Songket Sambas*. Deepublish.
- Sulistya, R. (2019). Heutagogi Sebagai Pendekatan Pelatihan Bagi Guru di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 127–138.
- Sunandar, Ibrahim, D., & Huda, N. (2019). Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) Di Sambas. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(1).
- Susilo, A. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA*, 6(2), 403–416.
- Syam, H. M. (2015). Sistem Penyiaran di Aceh Dari Era Kolonial Belanda Hingga Orde Baru: Satu Perspektif Sejarah. *Jurnal Al-Bayan*, 21(32), 84–96.
- Tendi. (2018). Propaganda Terhadap Umat Islam di Zaman Jepang, 1942-1945. *Tamaddun*, 6(1), 56–82.
- Tim Media Pusindo. (2008). *Pahlawan Indonesia*. Niaga Swadaya.
- Toer, P. A. (2002). *Bumi Manusia* (12 ed.). Hasta Mitra.

- Tribun Pontianak. (2019). *Gerattak Batu Sambas Simpan Keunikan Kisah Sejarah Penjajahan*.
Tribun Pontianak.
<https://pontianak.tribunnews.com/2019/01/16/gerattak-batu-sambas-simpan-keunikan-kisah-sejarah-penjajahan>
- Usman MHD, S. (2010). *Sambas-Merajut Kisah Menenun Sejarah*. Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Vitae, H. M. (2011). Peristiwa Mandor di Kalimantan Barat. *AND*.
<https://egivirus91.blogspot.com/2011/10/peristiwa-mandor-di-kalimantan-barat.html>
- Yunani, A. (2016). Gereja Santo Antonius Purbayan: Sejarah Awal Gereja Katolik Belanda di Solo. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(1), 229–256.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.